KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			=					
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR :	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 5 3 7				H.4 X Final	
		H.2 X Pembet	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
H.2 Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan H.5 Tidak Final								
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 7 9 8 9 3 2 3 3 1 7 2 8 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : NISRINA ULFAH, AMD.KEP.								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3		B.4	B.5	B.6	B.7	
4 21-402-01		4.	000.000	4.000.000	0	5	200.000	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04392/LS-THR/RSJD.AHM/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 2						2 0 2 2 <i>уууу</i>		
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor :	Nomor : Tanggal dd mm yyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							TIMUR	
C.3 ID Subunit	Organisasi :		╛ᄔ					
C.4 Tanggal : 2 6 dd 0 4 r		4 mm 2	2 0 2 2 уууу					
C.5 Nama Penai	ndatangan :	RIANDY						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							benar dan telah saya	
		Sesuai dengan keten elektronik sehingga ti		erlaku, Direktorat Jenderal Pajak an tanda tangan.	mengatur bahwa do	kumen ini tela	ah ditandatangani secara	

ILASCDG6